

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya beragam konflik dalam tatanan dunia memunculkan sebuah pemikiran bahwa perlunya sebuah badan yang bertindak untuk mencegah dan maupun menghentikan konflik. Kesadaran ini menumbuhkan keinginan masyarakat dunia untuk membangun kembali kerjasama internasional dan upaya-upaya penyelesaian konflik serta permasalahan-permasalahan internasional lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi atau forum Internasional memiliki tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang sesuai dengan Piagam PBB.¹ Dalam upaya penciptaan perdamaian, Dewan Keamanan (DK) PBB sebagai badan utama untuk menjaga dan menstabilkan keamanan dan perdamaian internasional.² Jika konflik muncul, DK PBB diberikan kewenangan untuk mengeluarkan resolusi baik berupa seruan gencatan senjata maupun pembentukan pasukan perdamaian. Hal ini sesuai dalam pernyataan David P.Barash:

*The Security Council was empowered to identify an aggressor and then to request various member states to provide military force as necessary to enforce the peace.*³

Operasi pemeliharaan perdamaian PBB / *United Nations Peacekeeping Operations* (UN PKO) diperkenalkan oleh Mantan Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjold pada tahun 1950-an dan merupakan istilah yang dipakai untuk segala

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global*, (Bandung: PT.Alumni, 2003), 648.

² Bruce Cronin and Ian Hurd, *The UN Security Council and The Politics of International Authority*, (New York: Routledge, 2008), 3.

³ David P. Barash, *Peace and Conflict Studies*, (London: Sage Publication, 2002), 353.

macam kegiatan operasional untuk membantu pencegahan konflik dan penciptaan perdamaian yang berkembang dan berada di bawah wewenang DK PBB. Sesuai dengan pasal 43 Piagam PBB menyatakan bahwa:

*“Semua anggota PBB, agar turut serta membantu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, memberikan kesanggupan untuk menyediakan angkatan bersenjata bagi Dewan Keamanan dan bantuan-bantuan serta fasilitas-fasilitas termasuk pula hak-hak lalu lintas, yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional apabila diminta dan sesuai dengan suatu persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus”.*⁴

Kesepakatan bersama masyarakat dunia mengakui perang terbuka harus diakhiri. Permusuhan antara pihak yang bertikai mesti diselesaikan di meja perundingan. Walaupun masih terjadi peperangan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan perdamaian dengan melibatkan anggota PBB, dimana Indonesia termasuk didalamnya, agar memberi ruang pada upaya bina damai selanjutnya. Dalam melakukan misi perdamaian, PBB melibatkan sejumlah *stakeholders* atau pemangku kepentingan. Termasuk di dalamnya tentara yang direkrut dari tiap-tiap negara anggota PBB yang menyediakan diri sebagai kontributor.

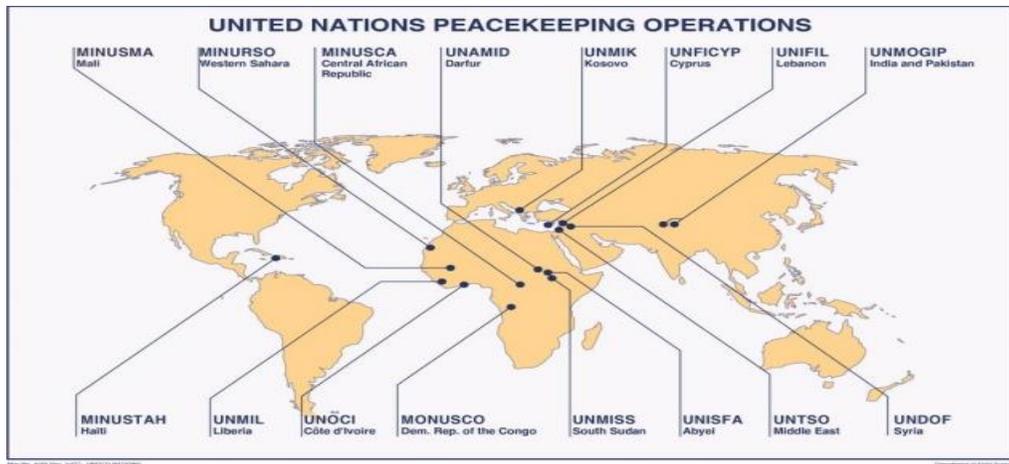
Sejak diperkenalkan oleh Mantan Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjold, peran UN PKO dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia terus meningkat dari waktu ke waktu. Misi *UN Peacekeeping* pada masa sebelum Perang Dingin tidak

⁴ United Nations, “Charter of the United Nations: Chapter VII,” <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html> (Diakses 30 Agustus 2015)

lebih dari 5 misi sedangkan saat ini terdapat 16 misi *UN Peacekeeping* di 4 benua seluruh dunia.⁵ Seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1.1

Operasi Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB



Sumber: United Nations Peacekeeping, “Peacekeeping Operations: Current Operations”,³⁰ Agustus 2015, <<http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml>>

Jumlah pasukan penjaga perdamaian, dikenal dengan “*blue helmets*”, terdiri dari *uniformed personnel* yang meningkat drastis dari 30 personil pada tahun 1950-an hingga mencapai 124.746 personil di tahun 2015 yang berasal 124 dari 192 negara anggota PBB yang bersedia menyumbangkan pasukan perdamaian dikenal sebagai

⁵ United Nations Peacekeeping, “Peacekeeping Operations: Current Operations”, <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml> (Diakses 30 Agustus 2015).

Troop Contributing Countries (TCC).⁶ Berikut tabel rincian pasukan penjaga perdamaian:

Tabel 1.1
Jumlah Pasukan Penjaga Perdamaian “Blue Helmets”

NO	KATEGORI	JUMLAH
1	<i>Uniformed Personnel</i>	
	Pasukan (<i>troop</i>)	90.889
	Polisi (<i>police</i>)	13.550
	pengamat Militer (<i>military observer</i>)	1.806
2	Personil Sipil (<i>civilian personnel</i>)	
	Sipil Internasional	5.315
	Sipil Lokal	11.476
3	UN <i>Volunteer</i>	1.710
	JUMLAH	124.746

Sumber: Diolah oleh penulis dari United Nations Peacekeeping, “UN Peacekeeping Operations Fact Sheet,” 31 Agustus 2015, <http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml> (Diakses 30 Agustus 2015)

Biaya operasi pasukan PBB mencapai \$8.27 milyar (1 Juli 2014 – 30 Juni 2015) dan dibiayai oleh kebanyakan negara-negara Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat.⁷ Negara penyedia pasukan pemelihara perdamaian (*Troop Contributing Country/TCC*) diberi gaji oleh PBB pada tingkat standar yang disetujui oleh Majelis Umum, kurang lebih \$1.332 per prajurit setiap bulannya.⁸

Sejalan dengan misi perdamaian dunia dari PBB, bangsa Indonesia yang telah merumuskan tujuan nasional Indonesia di dalam pembukaan UUD 1945 alinea

⁶ United Nations Peacekeeping, “UN Peacekeeping Operations Fact Sheet,” 31 Agustus 2015, <http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml> (Diakses 30 Agustus 2015)

⁷ United Nations Peacekeeping, “Financing Peacekeeping,” United Nations General Assembly, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/224/Add.1 (Diakses 30 Agustus 2015)

⁸ United Nations Peacekeeping, “Financing Peacekeeping,” <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/financing.shtml> (Diakses 30 Agustus 2015)

keempat menyatakan komitmennya untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁹ Sementara landasan visional bangsa Indonesia yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945 itu mau mengajak seluruh komponen bangsa untuk aktif terlibat dalam memperjuangkan kepentingan nasional guna mencapai tujuan nasional agar tercipta masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam alam yang demokratis. Hal inilah yang melatarbelakangi kebijakan politik Indonesia melaksanakan kepentingan nasionalnya dengan mengambil haluan politik luar negeri Bebas-Aktif.¹⁰

Peran Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian merupakan implementasi kerja sama pertahanan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kerja sama pertahanan memasukkan tugas TNI dalam *peacekeeping operation*. Buku Putih Pertahanan 2008 dalam Bab VI menyebutkan berkaitan dengan pengembangan pertahanan negara, TNI akan memenuhi tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam misi *international peacekeeping operation*.¹¹

Permintaan PBB tidak hanya untuk hanya melaksanakan mandat semata, pengiriman misi perdamaian Indonesia saat ini saat ini mulai dilihat memiliki manfaat timbal balik bagi Indonesia dalam meningkatkan citra positif sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kancah pergaulan internasional. Hal ini juga tampak dari semakin maraknya negara-negara berkembang terlibat mengirimkan

⁹ Dewi Fortuna Anwar, "Indonesia's Peacekeeping Operations: History, Practice, and Future Trend", *East Asia Forum* (2014): 189.

¹⁰ Leonard F. Hutabarat, "Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy : Challenges and Opportunities," *Jurnal Global & Strategis* (2014): 190.

¹¹ *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, 152.

kontingen mereka dalam pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian dunia sesuai era Perang Dingin.¹²

Inilah kesempatan sekaligus peluang bagi TNI untuk memiliki postur tentara yang profesional yang memiliki kemampuan teknis dan strategis yang sangat didukung oleh koordinasi dan manajemen antar pemangku kepentingan untuk mempercepat perubahan TNI yang diinginkan dari segi struktur dan komposisi, modernisasi peralatan, kesiapan pasukan serta ketahanan mengatur tingkatan aktifitas operasional guna mencapai tujuan militer yang mendukung kebijakan luar negeri. Adanya pengakuan atas kemampuan dan kehandalan TNI oleh masyarakat dunia yang lebih luas merupakan modal pokok bagi peran TNI sebagai cermin kemampuan bangsa Indonesia dalam menjaga keseimbangan serta kestabilan keamanan di kawasan. Keberhasilan operasi pemeliharaan perdamaian bagi TNI adalah keberhasilan TNI memanfaatkan dan menggarap *soft power* secara sistematis, masif dan terstruktur dengan keberhasilan dari optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan yang ada dalam penggelaran pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian.¹³

Kecepatan dan ketepatan pemerintah RI untuk menangkap peluang ini sangat tergantung dari kemauan politik pemerintah (*political will*). Pemerintah RI melihat kesempatan sekaligus peluang timbal balik dalam pelaksanaan tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia dengan pola yang berbeda dari pengiriman misi perdamaian sebelumnya. Perbedaannya adalah permintaan PBB dengan jumlah

¹² Ibid

¹³ Ibid

personel yang besar, kemampuan yang disesuaikan dengan peran multidimensi operasi yang lebih kompleks, kemampuan personel yang diharapkan serta kecepatan pengiriman pasukan dengan standar dan aturan pelibatan baru yang ditetapkan PBB dalam rangka penyelesaian konflik Israel-Lebanon tahun 2006.¹⁴

Hubungan Indonesia dan Lebanon telah terjalin sejak dulu, bermula sejak pengumuman pernyataan pengakuan *de-jure* kepada Indonesia oleh Presiden Lebanon Bechara El-Khoury pada tanggal 19 juli 1947. Lebanon merupakan negara ke-tiga setelah Mesir dan Suriah yang mengakui Indonesia menjadi negara merdeka, setelah itu Indonesia dan Lebanon terus meningkatkan hubungan diplomatik mereka dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan penerangan.¹⁵ Indonesia harus terus menjaga hubungan yang harmonis dengan negara-negara Timur Tengah, walaupun dikawasan tersebut sering terjadi konflik.

PBB membentuk operasi pemeliharaan perdamaian yaitu *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL). UNIFIL dibentuk sebagai tindak lanjut DK PBB atas protes keras Lebanon terhadap serangan Israel ke kawasan Lebanon Selatan yang berbatasan langsung dengan Israel. Permintaan Lebanon berkaitan erat dengan konflik yang terjadi di kawasan Lebanon Selatan sejak Maret 1978.¹⁶

¹⁴ Ministry of Foreign Affairs Republic Indonesia, *International Issues: Indonesia and The United Nations Peacekeeping Operations* (Indonesia: Ministry of Foreign Affairs Republic Indonesia, 2016), <http://www.kemlu.go.id/en/kebijakan/isu-khusus/Pages/Indonesia-and-the-United-Nations-Peacekeeping-Operations.aspx> (Diakses 1 Januari 2016)

¹⁵ Departemen Luar Negeri Indonesia, "Hubungan Indonesia-Lebanon", 2009, <http://www.deplu.go.id/beirut/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=1&l=id> (Diakses 26 Agustus 2016)

¹⁶ "Lebanon-UNIFIL-Background", diakses dari <http://un.org/Depts/dpko/missions/unifil/background.html> (Diakses 30 Agustus 2015)

Indonesia aktif berdiplomasi di PBB dan negara-negara OKI, aktif berkomunikasi ke Lebanon dan Israel melalui pihak ketiga dan meyakinkan bahwa Indonesia sangat siap untuk mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon dalam situasi seperti itu.¹⁷

Pada saat itu merupakan momentum bagi Indonesia mempertahankan komitmen dalam turut serta menjaga perdamaian di Timur Tengah dengan menyerukan gencatan senjata demi kestabilan keamanan dunia internasional. Indonesia menunjukkan rasa kepedulian akan keamanan di dunia internasional dan siap membantu demi terciptanya perdamaian bagi kedua belah pihak, sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945 dan tetap menjaga komitmen Indonesia dalam setiap misi pemeliharaan perdamaian di bawah mandat PBB di dunia Internasional.

Adanya inisiatif Indonesia untuk menugaskan pasukan penjaga perdamaianya dalam konflik Israel-Hizbullah di Lebanon merupakan bentuk diplomasi Indonesia di dunia internasional, hal tersebut merupakan salah satu wujud implementasi dari diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia di bawah mandat PBB yang dimulai sejak tahun 1957. Dalam pengiriman Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Kontingen Garuda, nuansa diplomasi terasa sangat kental bahkan tidak kalah penting dibandingkan tugas utama yang diembannya sebagai pasukan penjaga perdamaian di wilayah negara konflik sesuai **Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004** melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai

¹⁷ Tabloid Dipomasi, "Diplomasi Indonesia Konsisten Mengelola Perubahan", 2012, <http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2012/Tabloid%20Diplomasi%20Januari%202012.pdf> (Diakses 26 Agustus 2016)

perwujudan perubahan paradigma baru pertahanan nasional dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹⁸

Identitas pada penugasan TNI ke dalam OMSP yang berbeda dengan doktrin pola perilaku TNI dalam Operasi Militer Perang (OMP) sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004. Menyiapkan pasukan perang untuk menjadi pasukan pemelihara perdamaian merupakan suatu hal baru yang menarik untuk disimak. Dalam dunia militer hal ini sangat bertolak belakang dengan tugas utamanya sebagai pasukan perang, namun realitanya tugas ini telah diperankan oleh para prajurit angkatan bersenjata di seluruh dunia.¹⁹

Titik berat kepentingan Indonesia terhadap Misi Pemeliharaan Perdamaian adalah kepentingan bidang pertahanan. Seperti pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang HUT RI tanggal 14 Agustus 2009 yaitu:²⁰

“Dengan berakhirnya konflik dan operasi militer diberbagai tempat di Indonesia, maka menjaga perdamaian internasional juga merupakan suatu wadah pelatihan bagi TNI guna memperkuat profesionalismenya sesuai tingkat standar internasional”.

Partisipasi Indonesia dalam penyelesaian konflik Israel-Hizbullah di Lebanon di bawah mandat PBB merupakan arahan dari nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 yang bertujuan untuk turut serta dalam pemeliharaan perdamaian di dunia internasional. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia untuk mencapai kepentingan pertahanan di misi

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3)

¹⁹ Ibid, 4.

²⁰ Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 64 Kemerdekaan Republik Indonesia di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 Jakarta, 14 Agustus 2009

pemeliharaan perdamaian PBB khususnya misi UNIFIL, maka peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Seiring dengan meningkatnya konflik di level internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional yang memiliki tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional merespon berbagai situasi krisis kemanusiaan di wilayah konflik melalui misi *peacekeeping operations* di bawah wewenang salah satu organnya yaitu Dewan Keamanan PBB. Indonesia merupakan negara aktif berperan sebagai anggota komunitas internasional dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia **sebagai bentuk diplomasi pertahanan Indonesia. Salah satu bentuk implementasi diplomasi pertahanan tersebut yaitu** komitmen Indonesia turut serta menjaga perdamaian di Timur Tengah dengan menyerukan gencatan senjata demi kestabilan keamanan dunia internasional melalui pengiriman pasukan perdamaian yakni TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda XXIII, **khususnya ke Misi UNIFIL.** Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji lebih mendalam bagaimana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia melalui PBB sebagai bentuk dari diplomasi pertahanan Indonesia di forum internasional khususnya PBB. Penelitian ini dimulai dari adanya permintaan DK PBB (*UN DPKO*) kepada pemerintah RI hingga dengan kesiapan pemberangkatan personel dalam menjalankan sebuah misi UNIFIL sehingga menjadikan TNI yang profesional yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan nasional Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia melalui *United Nations Peacekeeping Operation*: Studi Kasus Kontingen Garuda dalam Misi UNIFIL tahun 2006-2010?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana **diplomasi pertahanan Indonesia melalui *United Nations Peacekeeping Operation*** melalui studi kasus Kontingen Garuda dalam Misi UNIFIL tahun 2006-2010.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, manfaat penelitian ini adalah melatih kemampuan dalam menganalisis secara ilmiah berkaitan dengan diplomasi pertahanan Indonesia terkait isu misi perdamaian dunia.
2. Bagi peneliti lain, manfaat penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran, referensi pemahaman dan bahan perbandingan dalam meneliti masalah yang sama dalam penelitian di masa yang datang.

1.6 Studi Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat sejumlah literatur atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, untuk memahami tentang motivasi dan keengganan negara berkontribusi dalam UN PKO, penulis merujuk pada jurnal karya Alex J. Bellamy dan Paul D. Williams, berjudul “Broadening the Base of United Nations Troop and Police-Contributing Countries”.²¹

²¹ Alex J. Bellamy and Paul D. Williams, “Broadening the Base of United Nations Troop and Police-Contributing Countries,” *Providing for Peacekeeping No. 1* (New York: International Peace Institute, August 2012).

Dalam karyanya ini, Alex J. Bellamy dan Paul D. Williams mendeskripsikan motivasi dan keengganan negara berkontribusi pada TCC dari misi perdamaian PBB.

Bellamy dan Williams memaparkan motivasi negara dalam TCC pada *UN Peacekeeping* dilihat dari segi pilihan politik, ekonomi, keamanan, institusional, dan norma. Penulis juga melihat bahwa alasan negara tidak berkontribusi pada UN PKO terkait alasan prioritas politik dan keamanan tiap negara (ketidakstabilan keamanan dalam negeri), ada negara yang tidak suka dengan agenda UN PKO yang cenderung dikuasi oleh *great power*, UN PKO sebagai sebuah pengecualian dari banyaknya mekanisme untuk bekerja sama, perdebatan pemerintah negara untuk memutuskan keterlibatan pada UN PKO, dan resiko reputasi negara dalam UN PKO dari dampak penyakit menular di daerah konflik.²²

Menurut Alex J. Bellamy dan Paul D. Williams motivasi negara dalam TCC pada *UN Peacekeeping*:

1. Politik, di mana partisipasi sebagai pasukan penjaga perdamaian dapat membantu negara untuk memenuhi tujuan politiknya. Persepsi bahwa kontribusi pada pasukan PBB memperkuat “national prestige” negara, respon rasional dari tekanan atau bujukan politik dari aliansi, *great power* atau *UN Secretary-General* atau mungkin memperkuat pencalonannya untuk kursi tidak tetap pada Dewan Keamanan PBB.²³
2. Ekonomi yaitu adanya sistem pembayaran kompensasi PBB bagi negara yang menyediakan TCC. Ada empat penerima manfaat. Pertama, pemerintah nasional,

²² Ibid, 1.

²³ Ibid, 3-4.

khususnya negara berkembang dengan “*small economies*” yang mungkin menggunakan pembayaran kompensasi PBB guna mendukung anggaran nasional dan sebagai upaya untuk memperoleh valuta asing. Kedua, sektor pertahanan dan keamanan nasional yang memandang pembayaran kompensasi PBB sebagai peluang untuk meningkatkan anggarannya. Ketiga, individu, khususnya anggota dan perwira militer dan polisi yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggelaran misi penjaga perdamaian PBB melalui tunjangan misi. Keempat, perusahaan swasta dan BUMN dapat memperoleh keuntungan dari kontrak pengadaan PBB mulai dari barang logistik hingga transportasi udara.²⁴

3. Keamanan, di mana negara TCC akan mempromosikan kepentingan keamanan nasionalnya yang lebih luas. Dalam hal ini, tingkat persepsi ancaman dalam konflik tertentu dapat menjadi pendorong utama terkait keputusan untuk menjadi TCC. Kedekatan wilayah juga berperan penting dalam menerima kontribusi dari negara tetangga atau kawasan terdekat. Terdapat juga satu kemungkinan di mana negara-negara lebih besar dengan pola pikir internasionalis berpandangan bahwa kepentingan keamanan nasionalnya berada dalam konteks yang lebih global.²⁵
4. Institusi yakni angkatan bersenjata, sektor keamanan, dan dinamika birokrasi suatu negara memberikan pengalaman internasional yang berharga bagi personil terkait. Pandangan lain bahwa UN PKO merupakan salah satu upaya “militer sibuk diluar negeri daripada dalam urusan domestik” suatu negara atau rehabilitasi setelah periode kepemimpinan yang sebelumnya otoriter. Sementara

²⁴ Ibid, 4.

²⁵ Ibid, 5.

bagi sebagian negara, partisipasi dalam operasi perdamaian PBB dapat juga dilihat sebagai peran yang memiliki martabat setelah Perang Dingin. Partisipasi ini dapat mencegah pemotongan anggaran militer secara signifikan akibat situasi damai pasca berakhirnya Perang Dingin.²⁶

5. Norma, dalam konteks “*self-image*” atau representasi negara sebagai “*global good samaritans*”, “*good international citizens*” atau sebagai anggota “*non-aligned*” dari negara yang mendukung PBB sebagai alternatif terhadap hegemoni “*great power*” atau sebaliknya merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Sementara beberapa negara mempertahankan komitmen prinsipnya pada PBB dengan melihatnya sebagai “*legitimate system*” dari manajemen konflik dan mengharapkan memainkan peran pendukung sebagai “*good international citizens*”.²⁷

Penelitian kedua untuk memahami keikutsertaan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB yang penulis temukan adalah penelitian yang ditulis oleh Bangkit Rahmat Tri Widodo yang berjudul “Misi Pemelihara Perdamaian Indonesia dalam Mendukung Politik Luar Negeri Bebas Aktif”,²⁸ jurnal ini mengemukakan bahwa Indonesia berperan aktif dalam misi perdamaian PBB berdasarkan politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif dalam rangka meningkatkan peran dan posisi Indonesia dalam lingkup Global. Aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan merupakan isi dari pembukaan UUD 1945 alinea ke-

²⁶ Ibid, 5.

²⁷ Ibid, 6.

²⁸ Bangkit Rahmat Tri Widodo, “Misi Pemeliharaan Perdamaian Indonesia dalam Mendukung Politik Luar Negeri Bebas Aktif”, (Universitas Pertahanan: 2010), 1.

4. Dalam penelitian ini penulis mendiskripsikan peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui misi perdamaian PBB yang dipaparkan menurut pemimpin Indonesia dari tahun ke tahun dan didasari Politik Luar Negeri Bebas Aktif.

Berawal dari kepemimpinan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto sampai pada era Reformasi (Bj Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri). Melihat sinergi penggunaan *soft power* (keberhasilan demokrasi, mayoritas islam dan posisi penting di GNB) (Josept Nye), dan *hard power* (misi pemelihara perdamaian) memperkokoh *smart power* (politik luar negeri Indonesia dalam rangka meningkatkan peran dan posisi Indonesia dalam tataran Global).²⁹

Menganalisa peran Kontingen Garuda dalam misi pemelihara perdamaian sebagai bentuk pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, lebih pada pendekatan sikap Indonesia menggunakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif di lingkungan eksternalnya dalam rangka meningkatkan peran dan posisi Indonesia dalam dunia internasional.³⁰

Kemudian, kajian pustaka ketiga untuk memahami arti penting upaya peningkatan kemampuan kapasitas pasukan perdamaian dalam menjalankan misi perdamaian dunia, peneliti merujuk pada karya yang ditulis oleh Plamen Pantev, Valeri Ratchev, Todor Tagarev, dan Viara Zaprianova dalam literatur yang berjudul *Hubungan Sipil-Militer dan Kendali Demokrasi Sektor Keamanan* yang ditulis oleh Todor Tagarev dalam sub judul “Kendali Demokrasi atas Perdamaian Internasional

²⁹ Ibid, 3-15.

³⁰ Ibid

dan Misi Kemanusiaan di Luar Negeri”,³¹ Penulis mengatakan negara cenderung berkeinginan untuk ditugaskan agar berpartisipasi dalam misi UN PKO. Demikian juga, militer dan jasa keamanan lainnya harus dipersiapkan untuk ikut dalam operasi perdamaian dan kemanusiaan, dan proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan partisipasi, kendali operasi, peraturan-peraturan yang akan ditetapkan, dan kesiapan harus berada dalam kendali sipil.³²

Keterlibatan parlemen dan legislatif yang intensif di dalam proses pengiriman tentara untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian dan kemanusiaan merupakan tanda bagi hubungan antara sipil-militer yang sehat. Hal ini memperkuat legitimasi demokrasi dan meningkatkan dukungan publik atas partisipasi di misi tersebut. Penulis juga menambahkan bahwa dalam situasi seperti ini, kendali demokrasi sipil dapat diperkuat jika parlemen atau masing-masing anggotanya benar-benar melaksanakan mekanisme kendali anggaran yang tersedia, mengadakan dengar pendapat, meminta laporan sesudah misi, atau mengunjungi tentara yang ditempatkan di luar negeri. Secara khusus, penulis melihat hal ini sebagai bagian dari kebijakan keamanan nasional, maka setiap keputusan untuk mengirim tentara untuk berpartisipasi dalam operasi perdamaian dan kemanusiaan internasional harus selalu didukung oleh sumber daya, sehingga tidak memiliki efek yang mengganggu sisa

³¹ Todor Tagarev, “Kendali Demokrasi atas Perdamaian Internasional dan Misi Kemanusiaan di Luar Negeri “ dalam *Hubungan Sipil-Militer dan Kendali Demokrasi Sektor Keamanan, Buku Pedoman*, ed. Plamen Pantev (Sofia: Procon, 2005).

³² Ibid, 117

angkatan bersenjata yang ada dalam hal jumlah tentara, peralatan, tingkat latihan dan kesiapan.³³

Lalu, kajian pustaka keempat oleh *Bambang Kismono dan Hadi Machmud Syafrudin dalam literatur dengan judul Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan*,³⁴ berkontribusi untuk melihat alasan Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke daerah konflik dalam misi UN PKO. *Kismono dan Hadi Machmud Syafrudin* menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam misi operasi perdamaian PBB dipandang sebagai penyeimbang di dalam komposisi misi perdamaian PBB karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan terletak di Asia. Hal ini juga ditambah dengan kenyataan bahwa konflik yang terjadi

³³ Ibid, 118.

³⁴ *Bambang Kismono dan Hadi Machmud Syafrudin,*

*Pasukan Penjaga
Perdamaian dan
Reformasi Sektor
Keamanan,
(Indonesia: IDSPS Press , 2009).*

saat ini sering melibatkan Negara muslim atau Negara berpenduduk muslim seperti yang terjadi di Bosnia, Lebanon, Irak bahkan Darfur di Afrika.³⁵

Keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB berdasarkan konstitusi Indonesia dan kewajibannya. Selain itu, bentuk diplomasi dalam meningkatkan citra Indonesia secara keseluruhan serta berdampak positif bagi lingkungan internal TNI. Hal ini karena menumbuhkan profesionalisme di lingkungan TNI, menaikkan citra TNI di dunia serta dalam upaya diplomasi pertahanan (*defence diplomacy*). Penulis menekankan latihan bagi pasukan penjaga perdamaian sangatlah diperlukan agar mereka mampu mengatasi setiap tantangan yang berkaitan dengan karakteristik utama pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian, yaitu multi-disiplin (multidisciplinary), multi-negara (multinational), sangat kompleks dan banyak dipengaruhi perubahan situasi di lapangan. Untuk mencapai tujuan ini, maka negara-negara anggota PBB yang akan berkontribusi perlu menyiapkan personelnnya yakni sipil, polisi, maupun militernya melalui latihan dan pendidikan.³⁶

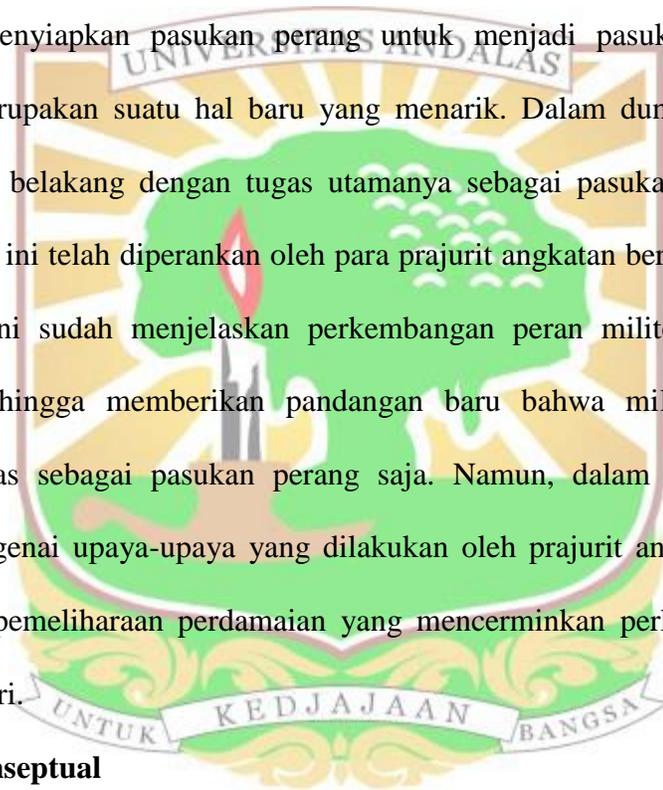
Menyiapkan pasukan perang untuk menjadi pasukan pemelihara perdamaian merupakan suatu hal baru yang menarik untuk disimak. Dalam dunia militer hal ini sangat bertolak belakang dengan tugas utamanya sebagai pasukan perang, namun realitanya tugas ini telah diperankan oleh para prajurit angkatan bersenjata di seluruh dunia.³⁷

³⁵ Ibid, 1.

³⁶ Ibid, 8.

³⁷ Ibid, 4.

Terakhir adalah jurnal yang berjudul “Flexibility Towards Diversity: New skills for Military Personel in PSOs” yang ditulis oleh Mariana Nucari untuk melihat perkembangan *peacekeeping operations* saat ini dengan keterlibatan ataupun peran militer.³⁸ Keterlibatan militer dalam operasi pemeliharaan perdamaian menjadi peran baru bagi militer, khususnya bagi militer profesional yang dalam teori sosiologi militer disebut dengan istilah: *The military peacekeepers* atau pasukan penjaga perdamaian. Menyiapkan pasukan perang untuk menjadi pasukan pemeliharaan perdamaian merupakan suatu hal baru yang menarik. Dalam dunia militer hal ini sangat bertolak belakang dengan tugas utamanya sebagai pasukan perang, namun realitanya tugas ini telah diperankan oleh para prajurit angkatan bersenjata di seluruh dunia. Jurnal ini sudah menjelaskan perkembangan peran militer dalam operasi perdamaian, sehingga memberikan pandangan baru bahwa militer tidak hanya melakukan tugas sebagai pasukan perang saja. Namun, dalam jurnal ini belum dijelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh prajurit angkatan bersenjata dalam operasi pemeliharaan perdamaian yang mencerminkan perkembangan peran militer itu sendiri.



Kerangka Konseptual

1.7.1 Diplomasi Pertahanan

Diplomasi merupakan proses politik damai antara negara bangsa yang mengharapkan struktur yang dapat membentuk dan mengatur hubungan sistem

³⁸ Mariana Nucari, *Flexibility Towards Diversity: New skills for Military Personel in PSOs*, (University of Torino, Department of Social Sciences, 2002)

internasional serta mengakomodasi kepentingan suatu negara.³⁹ Diplomasi dapat dijalankan melalui beberapa jenis instrumen seperti politik, ekonomi, perdagangan, bantuan, hak asasi, kontrol militer, budaya dan peningkatan akademik/pendidikan. Sedangkan *Defense* atau pertahanan berkaitan dengan kemampuan militer negara dalam mempersiapkan diri sebagai usaha penciptaan keamanan untuk menghadapi ancaman maupun serangan.⁴⁰ Namun, Diplomasi pertahanan bukanlah menggabungkan serta merta dua istilah itu.

Menurut Andrew Cottey dan Anthony Forster diplomasi pertahanan secara tradisional merupakan peran militer atau kekuatan pertahanan ditujukan untuk pertahanan negara baik melalui fungsi-fungsi penangkalan, pertahanan, intervensi militer, maupun sebagai instrumen pemaksa terhadap pihak lain. Dengan kata lain, penggunaan kekuatan persenjataan dan infrastruktur dan instrumen yang mendukungnya sebagai alat dalam kebijakan keamanan dan luar negeri.⁴¹ Dalam sejarahnya, diplomasi pertahanan biasanya dilakukan dalam bentuk kerjasama pertahanan dan bantuan militer, yang merupakan bagian dari *real-politik* internasional dan pertimbangan kekuatan untuk memenuhi kepentingan nasional.⁴² Suatu negara terlibat dalam kerjasama pertahanan, dan menyediakan bantuan kepada negara lain dengan tujuan untuk mengimbangi atau menggentarkan musuh, mengelola perluasan pengaruh, dan mendukung rezim yang bersahabat dalam menekan lawan politik

³⁹ S.L. Roy, *Diplomasi*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1991), 3.

⁴⁰ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity* (New Jersey: Prentice Hall, 1997), 346.

⁴¹ Andrew Cottey dan Anthony Forster, "Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance : Introduction", dalam *Adelphi Papers*, 44:365, (New York: Routledge, 2004), hal. 5-6.

⁴² *Ibid*, 6-7

domestik atau memposisikan kepentingan komersial, misalnya penjualan senjata dan kepentingan perdagangan yang lain.⁴³

Konsep ini kemudian berubah semenjak berakhirnya Perang Dingin dimana diplomasi pertahanan merupakan pendayagunaan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata sebagai cara untuk membangun hubungan kerjasama dengan negara lain. Aktivitas diplomasi pertahanan tidak hanya sebatas pengaturan kerjasama diantara negara-negara anggota pakta pertahanan, namun kerjasama dengan membangun kemitraan dengan negara-negara lainnya baik secara bilateral maupun multilateral.⁴⁴

Pergeseran makna diplomasi pertahanan saat ini terjadi, dimana kerjasama pertahanan dilakukan untuk memenuhi tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih luas. Aktivitas diplomasi pertahanan dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya :⁴⁵

1. Terjadinya hubungan bilateral dan multilateral antara pejabat militer dan pejabat sipil pertahanan senior.
2. Penunjukan atase pertahanan di luar negeri.
3. Perjanjian kerjasama pertahanan bilateral.
4. Latihan bersama antara personil pertahanan militer asing dan sipil.
5. Penyediaan keahlian dan saran dalam kontrol demokrasi kekuatan bersenjata, manajemen pertahanan dan bidang teknis militer.

⁴³ Ibid, 6

⁴⁴ Ibid, 6

⁴⁵ Ibid,7.

6. Pertukaran personil dan unit militer dan kunjungan kapal.
7. Penempatan personil militer ataupun sipil di kementerian pertahanan atau militer negara sahabat.
8. Penyediaan peralatan militer dan bantuan materi lainnya.
9. Latihan militer bilateral ataupun multilateral

Menurut Andrew Cottey dan Antony Froster dalam mengembangkan konsep diplomasi pertahanan, terdapat tiga peran baru militer dalam kerangka diplomasi pertahanan, yaitu *strategic engagement* untuk mencegah konflik dan untuk mengembangkan apa yang disebut saling percaya (*Confidence Building Measures/CBM*), mempromosikan hubungan sipil-militer yang demokratis, dan memperkuat kapabilitas pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping operations*).⁴⁶

Pada penelitian ini, kegiatan yang dilakukan Indonesia terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB khususnya UNIFIL merupakan implementasi diplomasi pertahanan. Merujuk pada aktivitas tersebut, konsep diplomasi pertahanan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai diplomasi yang dilakukan untuk mencapai kepentingan pertahanan. Jadi, diplomasi sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan pertahanan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka diplomasi pertahanan Indonesia terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB khususnya Misi UNIFIL di Lebanon dapat dilakukan dalam rangka CBM dan diplomasi yang dilakukan untuk mencapai kepentingan pertahanan khususnya profesionalisme pasukan TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda.

⁴⁶ Ibid, 7

1.7.2 Konsep *Peacekeeping*

Penelitian ini menggunakan konsep *peacekeeping* untuk menjelaskan perkembangan peran TNI dalam *peacekeeping operation* di Lebanon. Menurut PBB, *peacekeeping* adalah teknik yang dirancang untuk memelihara perdamaian pada saat konflik mereda dan untuk membantu implementasi perjanjian yang disepakati oleh para pembuat perdamaian serta menciptakan kondisi untuk perdamaian abadi.⁴⁷ Perkembangan *peacekeeping* ke arah yang lebih kompleks dengan melibatkan penggabungan berbagai instrumen seperti militer, polisi dan sipil telah menunjukkan pula perkembangan peran TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian. Prinsip-prinsip dalam *peacekeeping operations* secara umum meliputi:⁴⁸ persetujuan pihak-pihak terlibat, maksudnya adalah *peacekeeping operations* tersebut dikerahkan dengan persetujuan pihak-pihak utama yang terlibat konflik. Persetujuan tersebut penting, karena tidak adanya persetujuan membuat posisi pasukan *peacekeeping* menjadi pihak yang terlibat konflik dan akan ditarik lebih jauh ke tindakan-tindakan perang. Sehingga, akan jauh dari peran utama sebagai pasukan penjaga perdamaian. Prinsip yang kedua yaitu imparsialitas, maksudnya adalah pasukan *peacekeeping* harus menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak secara netral. Hal tersebut dapat mendukung pelaksanaan persetujuan dan kerjasama dari pihak-pihak terkait. Namun, pasukan *peacekeeping* harus memiliki komitmen kuat untuk tetap menjalankan

⁴⁷ United Nations Peacekeeping, "What Is Peacekeeping?", <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml> (Diakses 25 Agustus 2015)

⁴⁸ United Nations Peacekeeping, "Principles of UN Peacekeeping", <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/principles.shtml> (Diakses 25 Agustus 2015)

mandat yang telah diamanatkan. Prinsip terakhir yaitu tidak menggunakan kekerasan kecuali untuk mempertahankan diri dan melindungi mandat.

1.7 Metodologi Penelitian

1.8.1 Metode Deskriptif

Dalam penulisan skripsi ini, dipergunakan penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara spesifik mengenai suatu situasi, *setting* sosial, maupun suatu hubungan.⁴⁹ Pada intinya, metode deskriptif berupaya untuk menggambarkan mengenai situasi atau fenomena yang sedang terjadi. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran, lukisan, secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diteliti.

1.8.2 Batasan Penelitian

Waktu penelitian ini dibatasi dimulai tahun 2006-2010. Peneliti membatasi mulai tahun 2006 sejak ada permintaan DK PBB (*UN DPKO*) kepada pemerintah Republik Indonesia hingga dengan kesiapan pemberangkatan personel, yakni KONGA XXIII A-E UNIFIL tahun 2006 hingga 2010. Dimulai dari permintaan pertama kali tahun 2006 kemudian ditambahkan dengan catatan tahun-tahun sesudahnya hanya untuk mempermudah penggambaran keseluruhan mekanismenya.

⁴⁹ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston-London: Allyn and Bacon, 1997), 19-20.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam proses memilih tingkat analisis, maka peneliti harus menetapkan unit analisis, yaitu perilaku yang hendak dideskripsikan, jelaskan dan ramalkan, atau disebut juga dengan variabel dependen, serta variabel independen atau disebut juga dengan unit eksplanasi, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen.⁵⁰ Maka berdasarkan penjelasan tersebut, unit analisis dalam penelitian ini adalah Indonesia dan unit ekplanasi yang digunakan adalah konflik Lebanon dan Israel. Lalu, tingkat analisis yang ditetapkan dalam penelitian adalah negara yaitu Indonesia.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan data sekunder dari studi kepustakaan (*library research*), sehingga sumber-sumber data akan didapat dari buku, jurnal, dokumen, laporan dan sumber lain seperti internet surat kabar ataupun media lainnya yang relevan sebagai sumber informasi. Di samping studi pustaka, penelitian ini juga menggunakan data yang di dapat dari lapangan untuk mempertajam analisis serta memperoleh data primer untuk memetakan diplomasi pertahanan Indonesia dalam UN PKO. Studi lapangan dilakukan dalam bentuk wawancara, analisis data hasil *interview* dengan metode *purposive sampling* terhadap beberapa nara sumber yang relevan. Narasumber tersebut antara lain adalah para pelaku misi perdamaian seperti pasukan perdamaian, komandan dan juga pengamat militer yang secara langsung terjun dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan misi perdamaian tersebut. Narasumber lain yang dirujuk dalam penelitian ini adalah

⁵⁰Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990): 35

para pembuat kebijakan luar negeri Indonesia di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola dan memilih mana yang terpenting dan bisa menjawab permasalahan yang ada.

Pengolahan data dilakukan dengan seleksi sumber-sumber data yang relevan terhadap isu yang diteliti dan sesuai dengan tujuan penelitian. Informasi-informasi, data, fakta, serta bukti-bukti yang mendukung analisis penelitian akan disusun kembali secara terstruktur, dan untuk menjelaskan fenomena studi yang dikaji dalam penelitian ini. Merekam semua kemungkinan yang terkait yang dinyatakan oleh subjek, mencek dengan pengetahuan diri sendiri, mendialogkan bersama ahlinya, memberi tafsiran bersama atas makna/artinya, dan Menetapkan, menguraikan dan mendokumentasikan alur sebabsebab/konteks-konteks didalam pengetahuan yang sedang dipelajari beserta rincian-rinciannya.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN. Pengantar yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konsep yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. Menggambarkan secara keseluruhan tentang permasalahan penelitian yang akan diteliti.

BAB II PERSERIKATAN BANGSA BANGSA DAN *UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN LEBANON* (UNIFIL)

Bab ini berisikan peran PBB dalam upaya pengiriman misi perdamaian, pasukan dan implementasi aturan pelibatan pasukan pemelihara perdamaian PBB, dan UNIFIL.

BAB III PASUKAN PERDAMAIAN INDONESIA. Bab ini deskripsi mengenai sejarah pembentukan dan pengiriman pasukan Indonesia, Dinamika pengiriman pasukan perdamaian Indonesia, dan keterlibatan Indonesia dalam UNIFIL.

BAB IV ANALISIS DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM UNIFIL . Bab ini deskripsi mengenai Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam UNDPKO yang berkaitan dengan keputusan para pembuat kebijakan terkait pengiriman pasukan perdamaian PBB .

Bab ini juga akan menganalisis kontingen Garuda dalam UNIFIL.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang berdasarkan kepada pertanyaan penelitian yang diangkat serta saran.

